



PENINGKATAN PENDIDIKAN INKLUSIF DAN BERKEADILAN: JEJAK KERJASAMA INDONESIA-UNESCO

Improving Inclusive and Equitable Education: Traces Indonesia-UNESCO Cooperation

Agista

Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Semarang

agista16@students.unnes.ac.id

ABSTRAK: Penelitian ini membahas mengenai Peningkatan Pendidikan Inklusif dan Berkeadilan di Indonesia sebagai hasil kerjasama hubungan internasional dengan UNESCO. Rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini yaitu 1) Bagaimana sejarah hubungan Indonesia dengan UNESCO dari waktu ke waktu?. 2) Bagaimana mekanisme kerjasama antara UNESCO dan Indonesia dalam pengembangan kurikulum pendidikan?. 3) Apa saja program atau proyek konkret yang telah dilakukan dalam kerjasama ini dan bagaimana dampaknya terhadap pendidikan di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka atau Library Research. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui perkembangan sistem pendidikan yang merata dan inklusif di Indonesia sebagai hasil dari adanya hubungan internasional dengan UNESCO. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, dilakukan melalui penerapan Program Guru Mandiri yang terfokus pada pengembangan kurikulum, keterampilan guru, dan strategi pendekatan pembelajaran.

Kata kunci: Hubungan Internasional Indonesia-UNESCO, Pendidikan Inklusif dan Berkeadilan, Program Guru Mandiri

ABSTRACT: This research discusses the Improvement of Inclusive and Equitable Education in Indonesia as a result of international relations cooperation with UNESCO. The formulation of the problem raised in this article is 1) What is the history of Indonesia's relationship with UNESCO over time? 2) What is the mechanism of cooperation between UNESCO and Indonesia in the development of educational curriculum? 3) What are some concrete programs or projects that have been carried out in this collaboration and how have they impacted education in Indonesia? The research method used is qualitative descriptive with library research data collection techniques. The purpose of this research is to determine the development of an equitable and inclusive education system in Indonesia as a result of international relations with UNESCO. The results of this study show that in achieving the goal of improving the quality of education in Indonesia, it is carried out through the implementation of the Independent Teacher Program which focuses on curriculum development, teacher skills, and learning approach strategy.

Keywords: Indonesia-UNESCO International Relations, Inclusive and Equitable Education, Independent Teacher Program.



PENDAHULUAN

Indonesia bergabung dalam keanggotaan UNESCO pada 27 Mei 1950. Bergabungnya Indonesia dalam organisasi internasional ini dilatarbelakangi oleh pandangan politik luar negeri bebas aktif serta pandangan multilateral atau hubungan antar berbagai pihak dengan tujuan mengembangkan kerjasama global. Indonesia diterima menjadi bagian dari UNESCO ditandai dengan surat Perdana Menteri RIS untuk menjadi anggota UNESCO dan keputusan sidang *Executive Board* serta sidang umum UNESCO.

Sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara merupakan negara berkembang. Adanya pendidikan yang dianggap kurang penting membuat kualitas pendidikan di negara-negara tersebut bisa dikatakan rendah. Kesulitan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan pendidikan secara tidak langsung memerlukan dukungan pihak lain. Kehadiran pihak lain memungkinkan pemerintah Indonesia membagi tugasnya dengan lebih efektif. Untuk itu, organisasi internasional seperti UNESCO ikut berperan.

Sebagai negara berkembang, Indonesia kerap mendapat bantuan dari UNESCO. Program bantuan UNESCO ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. UNESCO sendiri telah mendukung Indonesia, misalnya dengan mengembangkan rencana politik dan kebijakan pendidikan, serta menghasilkan penilaian untuk membantu menentukan perubahan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), melakukan sidang Pleno *General Conference UNESCO* yang diadakan pada 25 Mei 1950 yang menghasilkan:

“Menimbang bahwa Pemerintah Republik Indonesia Serikat telah menyampaikan pada tanggal 5 Januari 1950 aplikasi keanggotaan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;

Menimbang bahwa, sesuai peraturan tata laksana General Conference,

aplikasi ini didukung oleh pernyataan bahwa Republik Indonesia Serikat bersedia menjunjung Konstitusi UNESCO. Menimbang bahwa, sesuai Pasal II Perjanjian antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, aplikasi ini diserahkan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa;

Menimbang bahwa, pada Sesi Kesepuluh, Dewan memutuskan tidak memiliki keberatan atas penerimaan Republik Indonesia Serikat oleh Organisasi;

Menimbang bahwa, mengikuti keputusan ini, Dewan Eksekutif memutuskan pada Sesi Kesembilan belas untuk memberikan rekomendasi kepada General Conference mengenai penerimaan Republik Indonesia Serikat sebagai anggota Organisasi,

Memutuskan untuk menerima Republik Indonesia Serikat sebagai anggota United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO 1950: 8; terjemahan oleh Penyunting).”

UNESCO merupakan organisasi dibawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) yang memiliki misi untuk menciptakan perdamaian dunia serta kepentingan umum melalui pembangunan dan kerjasama dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan informasi. Untuk itu, Indonesia dalam membangun hubungan internasional dengan UNESCO mengambil peran aktif untuk mewujudkan kepentingan dalam rangka mencapai tujuan nasional Indonesia salah satunya dalam bidang pendidikan.

Pada 14 Januari 1922, didirikan Komisi Internasional Kerjasama Intelektual dibawah Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian, 1 Agustus 1922 dilakukan sidang pertama yang menunjuk Henri Bergson filsuf Perancis sebagai pimpinan. Hal yang dibahas dalam sidang tersebut salah satunya juga mencakup persiapan untuk



mendirikan lembaga khusus untuk bekerja dalam sektor ilmu pengetahuan di tingkat internasional yakni Institut Kerjasama Intelektual yang dimulai pada 16 Januari 1926. Namun, lembaga ini hanya berjalan selama 14 tahun sampai terjadi Perang Dunia II, terutama dalam bidang pendidikan, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam, serta properti keilmuan dan hak cipta.

Pendidikan merupakan salah satu fokus UNESCO sejak awal, hal ini dikarenakan sejak Perang Dunia I yang banyak menghancurkan fasilitas pembelajaran. Tahun 1930, Institut Kerjasama Intelektual melakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana yang masih dapat digunakan seperti menata kembali dokumen bahan ajar dan kembali menjalin hubungan antar bangsa dalam dunia pendidikan salah satunya yaitu Indonesia. Selain itu, peningkatan akses pendidikan mulai dilaksanakan pada tahun 1936, dengan pemerataan pendidikan di daerah pedesaan dan pengajaran pendidikan tentang perdamaian.

Sejak tahun 1926 sampai 1940, Institut Kerjasama Intelektual membentuk Pusat dan Komite kegiatan pendidikan sebagai landasan program UNESCO yang terdiri dari: 1) Pelaksanaan pendidikan tinggi, 2) Syarat penerimaan pendidikan tinggi, 3) penyetaraan jenjang Sarjana dan Diploma, 4) Pertukaran antar Universitas, 5) Pendidikan vokasi di Eropa, 6) Pengangguran lulusan Universitas, 7) Sanatorium Internasional; Universal, 8) Pers Mahasiswa, 9) Pelaksanaan Pendidikan Menengah, 10) Pendidikan orang dewasa, 11) Perpustakaan Publik, Sinema, radio, serta Pers, 13) revisi buku teks Geografi dan Sejarah.

Dari beberapa landasan program UNESCO, Indonesia telah turut serta mengambil peran dalam memajukan pendidikan melalui kerjasama internasional yang dibangun oleh Indonesia-UNESCO membawa dampak yang signifikan terutama dalam pemerataan akses pendidikan dan strategi pelayanan pembelajaran. Artikel ini akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan program pembelajaran yang

dikembangkan sebagai hasil modifikasi atas program kerjasama Indonesia-UNESCO. Penelitian ini menjadi urgensi dikarenakan banyak hal yang masih perlu dipahami dalam memaknai suatu hubungan Internasional secara kritis dan analitis supaya negara dan khususnya masyarakat dapat berperan aktif dalam memajukan layanan pendidikan terutama di Indonesia.

METODA

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini yaitu deskriptif kualitatif yang berfokus pada menghasilkan pembahasan berupa deskripsi masalah. Penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti (Mantra, 2008: 30). Tahapan penelitian kualitatif ini dilaksanakan dengan mengumpulkan berbagai sumber kepustakaan seperti literatur jurnal, e-book, dan arsip-arsip dokumen yang relevan dengan pokok permasalahan artikel.

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini didasarkan menurut Miles dan Huberman, dengan membagi tahapan analisis ke dalam 3 bagian yaitu penyederhanaan data (*Reduction*), menghilangkan data yang tidak relevan (*Display Data*), dan penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*). Dengan tujuan analisis data guna menguraikan suatu kondisi atau peristiwa tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan yang ada. Sesuai dengan tujuan tersebut artikel ini akan membahas mengenai sejarah hubungan Indonesia dengan UNESCO dalam membentuk pendidikan yang inklusif dan berkeadilan dari aspek yang menjadi fokus pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini akan membahas mengenai kerjasama Indonesia-UNESCO dalam bidang pendidikan, fokus yang akan menjadi bahan penelitian ini yaitu pengembangan kurikulum dan keterampilan pendidik. Sebelumnya, sejak

1950 Indonesia telah aktif mendukung ketercapaian tujuan UNESCO dalam membangun budaya perdamaian, pengentasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, serta hubungan antar budaya. Keanggotaan Indonesia di UNESCO secara langsung mencerminkan amanat Konstitusi UUD 1945 yang berisi tentang „ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia“.

Indonesia telah mendapat pengakuan internasional dalam berbagai peninggalan budaya, dimana per tahun 2022 Indonesia tercatat memiliki warisan dan situs dunia seperti :

- 1) 9 situs alam dan budaya yang diakui sebagai UNESCO *World Heritage* terbanyak di Asia Tenggara, diantaranya : Candi Borobudur ditetapkan UNESCO pada tahun 1991, Taman Nasional Komodo (1991), Candi Prambanan (1991), Taman Nasional Ujung Kulon (1991), Situs Manusia Purba Sangiran (1996), Taman Nasional Lorentz (1999), Hutan Hujan Tropis Sumatera (2004), Lanskap Budaya Provinsi Bali “Sistem Subak sebagai Manifestasi Filsafat Tri Hita Karana (2012), dan Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto (2019).
- 2) 8 arsip dokumen sejarah Indonesia yang masuk sebagai Ingatan Kolektif Dunia (*Memory of the World*) diantaranya : Arsip VOC, Arsip Konferensi Asia Afrika, Babad Diponegoro, Arsip Konservasi Borobudur, Arsip Tsunami, La Galigo, Nagarakertagama, dan Cerita Panji.
- 3) 4 Kota di Indonesia yang termasuk dalam daftar UNESCO *Creative Cities Network* yaitu Ambon - Kota Musik, Bandung - Kota Kreatif, Jakarta - Kota Literasi, dan Pekalongan - Kota Kerajinan.

Peranan penting yang dijalankan Indonesia dalam peningkatan bidang pendidikan yang menjadi prioritas UNESCO salah satunya yaitu pengiriman tenaga ahli pendidikan Indonesia untuk ditempatkan di Sekretariat Task Force for Teachers. Pada 2015. Indonesia menempatkan bantuan tenaga ahli di Teacher Task Force for

Education for All, yaitu program utama UNESCO yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas guru dalam mencapai Millenium Development Goals (MDGs).

Perkembangan pencapaian MDGs atau Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) yang merupakan kesepakatan Internasional yang dilakukan oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Deklarasi MDGs berisi tentang arah pembangunan secara global meliputi: a) Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan berat, b) Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang, c) Mempromosikan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, d) menurunkan kematian anak, e) Meningkatkan kesehatan Maternal, f) Melawan penyebaran HIV/Aids, Malaria, dan Tuberkulosa, g) Menjamin keberlangsungan lingkungan, dan h) Mengembangkan Kemitraan Global untuk pembangunan.

Bentuk implementasi dari orientasi pembangunan MDGs sudah terjadi sejak pemerintahan Indonesia pada masa kepemimpinan Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri. MDGs masa pemerintahan Presiden Soekarno diwujudkan dalam bentuk penerbitan dokumen perencanaan pembangunan yang dinamakan Garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun (*Repelita*) yakni pada rentang tahun 1956-1960 dan pokok Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahun 1961-1969.

Berdasarkan dua dokumen pembangunan tersebut, dapat diketahui bahwa pada waktu itu Indonesia telah berusaha untuk menangani permasalahan pembangunan millennium. Hal ini dapat ditunjukkan dengan peningkatan kualitas penduduk yang dilaksanakan melalui pembangunan kemasyarakatan, pendidikan, kesejahteraan, yang terdapat dalam dokumen Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun (*Penaspede*, 1961-1969). Dengan adanya hal tersebut, maka dapat terlihat bahwa peningkatan kualitas manusia menjadi komitmen yang telah dilakukan jauh



sebelum disepakatinya MDGs secara global meskipun pelaksanaan program tersebut tidak belangsung lama diakibatkan adanya krisis politik pada 1965.

Hal penting dalam Sektor pendidikan pada 2015 diadopsinya rancangan Kerangka Aksi "Pendidikan 2030" *Framework for Action* (FFA). Dokumen ini pertama kali dibahas pada *World Education Forum* (WEF 2015) yang diselenggarakan di Incheon, Korea Selatan, 19-22 Mei 2015. UNESCO

memanfaatkan momentum Konferensi Umum ke-38 untuk meratifikasi Kerangka Aksi Pendidikan 2030, yang menetapkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai komunitas internasional pada tahun 2030. Menyaksikan disahkannya rancangan FFA, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengeluarkan pernyataan singkat yang menguraikan tekad Indonesia untuk memperjuangkan pendidikan sebagai prioritas nasional.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Tujuan Pendidikan Pasca-2015, yang bertujuan untuk "menjamin pendidikan yang setara dan berkualitas serta pembelajaran sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030". Hal ini sejalan dengan tujuan kemerdekaan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa janji kemerdekaan adalah untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pada tahun 2015, Indonesia juga meraih keberhasilan di bidang pendidikan, salah satunya dengan meraih penghargaan UNESCO *Japan Prize for Education for Sustainable Development*. Penghargaan UNESCO bidang Pendidikan pertama kali diberikan pada Sidang Umum UNESCO ke-38 pada tahun 2015. Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Informal dan Informal Bandung (Balai Jayagiri) terpilih menjadi salah satu dari tiga pemenang.

Melalui berbagai pencapaian yang dilakukan oleh Indonesia dalam bidang pendidikan menunjukkan peran besar negara dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkeadilan. Seperti yang dijelaskan oleh Bell & Stevenson, (2006)

bahwa kebijakan tentang pendidikan adalah rencana penting pemerintah dalam mengatur pelaksanaan sistem pendidikan di seluruh dunia. Pendidikan menjadi usaha untuk mengembangkan potensi peserta didik baik dalam bidang akademik maupun non akademik yang diperlukan oleh diri sendiri serta masyarakat melalui kegiatan pembelajaran.

Permasalahan dalam kebijakan pendidikan di negara berkembang seperti Indonesia mencakup pemerataan, kualitas hasil pembelajaran, lingkungan belajar, kapasitas sistem untuk mempersiapkan siswa menghadapi masa depan, pendanaan, tata kelola yang tidak efektif, penilaian dan evaluasi. Pemilihan instrumen dalam meningkatkan pendidikan tentunya harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah, terutama dengan dikenalnya *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsep ini dikenalkan oleh Perdana Menteri Norwegia yaitu Gro Harlem Brundtland pada 1987 yang menjelaskan tentang masalah pertumbuhan masyarakat, keterbatasan sumber daya dan distribusinya.

Pada KTT PBB tahun 2012, PBB merumuskan tujuan SDGs yang mulai berlaku pada 1 Januari 2016 dengan tujuan pencapaian dalam lima belas tahun. 17 tujuan dari SDGs salah satunya memastikan inklusif dan pendidikan berkualitas yang berkeadilan dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua kalangan. Menurut Nolet (2017) terdapat pendekatan yang dapat dilakukan guru untuk melaksanakan visi pendidikan berkualitas yaitu 1) melaksanakan praktik pendidikan yang responsif secara budaya dan, 2) membantu peserta didik mengembangkan pandangan berkelanjutan tentang dunia pendidikan. Dalam pendidikan responsif secara budaya oleh peserta didik menunjukkan apa yang sudah diketahui dan mempromosikan prestasi siswa serta rasa kesejahteraan tentang tempat budaya dengan menghubungkan pengetahuan budaya, pengalaman sebelumnya, dan gaya pribadi peserta didik dengan pengetahuan akademik.



Pandangan dunia yang berkelanjutan tentang pendidikan memberikan dukungan kepada pelajar untuk mempersiapkan diri dalam rangka terlibat secara aktif dan efektif dengan kompleksitas, ketegangan, dan ketidakpastian terkait penciptaan ruang aman dan adil bagi manusia dan spesies lain pada masa yang akan datang. Sehingga, akan terjadi suatu hubungan yang dapat membantu guru dalam menciptakan lingkungan kelas yang semua sumber daya memiliki kesempatan untuk menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman sebelumnya, pengetahuan budaya, dan gaya dalam bertindak.

Konsep pendidikan inklusif digagas oleh negara-negara Scandinavia yaitu Denmark, Norwegia, dan Swedia. Menurut Sapon Shevin dalam (o" Neil 1994) dijelaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak kebutuhan khusus belajar di sekolah dan dikelas biasa dengan teman seusianya. Kemudian menurut Stainback (1980) sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif merupakan sekolah yang menerima semua murid di kelas yang sama dengan menyesuaikan program pendidikan yang layak, menantang dengan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik.

Dengan adanya pendidikan inklusif maka anak dengan kebutuhan khusus mendapat perlakuan yang sama seperti peserta didik yang lain dalam meningkatkan potensi yang dimiliki. Anak-anak yang normal dan memiliki kebutuhan khusus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana mereka perlu diberikan kesempatan dan peluang yang sama dengan anak pada umumnya dalam mendapatkan pelayanan pendidikan terdekat.

Upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya Departemen Pendidikan Nasional dalam memainkan peran mewujudkan pendidikan inklusif yang merata diantaranya yaitu 1) pada bulan Oktober tahun 2016 Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Bandung mengangkat pegawai untuk pendidikan inklusif, 2)

Memberikan pelatihan tentang pendidikan inklusif kepada tenaga kependidikan, 3) mewajibkan calon guru dari tingkat sekolah Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi diberikan pengetahuan mengenai pendidikan inklusif.

Persoalan pada pendidikan inklusif berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh karena itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan tiga perjanjian Internasional yang menjadi tolak ukur bagi negara-negara dalam mencapai tujuan pendidikan diantaranya yaitu: 1) Konvensi UNESCO tentang penentangan diskriminasi dalam dunia pendidikan, 2) Konvensi penghapusan terhadap diskriminasi rasial dan, 3) Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dengan adanya hal tersebut, sekolah inklusif memiliki peranan penting untuk mengoptimalkan potensi peserta didik terutama bagi anak kebutuhan khusus dengan modifikasi atau penyesuaian kebutuhan.

Dalam kata lain, pendidikan inklusif mengarahkan pihak sekolah untuk menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu siswa, bukan siswa yang menyesuaikan dengan sistem sekolah. Mengingat pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang memiliki nilai fundamental dan dilindungi serta dijamin oleh berbagai instrumen pemerintahan baik nasional maupun internasional. Seperti Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/ bakat istimewa, serta dari pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO tahun 1994). Isi dokumen tersebut antara lain :

1. Prinsip dasar dari sekolah inklusi yaitu jika memungkinkan semua anak berhak belajar bersama dengan tidak memandang kesulitan atau perbedaan yang ada. Sekolah inklusif harus mengenal, merespon, mengakomodasi, dan menjamin diberikannya pendidikan yang berkualitas kepada semua peserta didik melalui penyusunan kurikulum,

pengorganisasian dan pemilihan strategi pembelajaran yang tepat.

2. Sekolah inklusif harus memberikan dukungan lebih terhadap anak berkebutuhan khusus dalam menjamin keefektifan pendidikan mereka. Penempatan permanen seorang anak di sekolah luar biasa, kelas khusus, atau bagian khusus di sekolah reguler harus menjadi pengecualian, kecuali jelas bahwa pengajaran di kelas reguler tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan atau sosialnya. Hal ini diperlukan demi kesejahteraan anak atau kesejahteraan anak lain di sekolah.

Dokumen di atas juga memuat prinsip fundamental mengenai inklusivitas yang terkandung dalam Deklarasi Salamanca antara lain:

1. Anak menunjukkan keberagaman karakteristik dan kebutuhan.
2. Perbedaan adalah hal yang lumrah, sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan anak.
3. Sekolah harus adil terhadap semua anak.
4. Anak-anak penyandang disabilitas harus bersekolah di sekolah setempat tempat mereka tinggal.
5. Partisipasi masyarakat bagi inklusi.
6. Pengajaran yang terpusat pada anak
7. Kurikulum yang fleksibel disesuaikan dengan anak
8. Sumber dan dukungan yang tepat.
9. Inklusi penting bagi harga diri dan pelaksanaan hak asasi manusia secara penuh
10. Memberikan manfaat untuk semua anak karena membantu menciptakan masyarakat yang inklusif
11. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya pendidikan
12. Sekolah reguler dengan orientasi inklusif menjadi cara efektif untuk memerangi diskriminasi, dan menciptakan masyarakat yang terbuka serta pendidikan merata,
13. Memberikan pendidikan efektif pada mayoritas anak dan menekan biaya keseluruhan sistem pendidikan.

Pendidikan merupakan wilayah yang menjunjung prinsip keadilan sehingga dapat dimasuki siapa saja tanpa memandang identitas, karena pendidikan memiliki sifat obyektif. Setiap pelajar memiliki hak yang sama dan perlakuan yang sama dalam mencapai pendidikan dengan disesuaikan kebutuhan. Melalui pendidikan, semua siswa dapat mengembangkan potensi diri yang dimiliki untuk mencapai cita-cita di masa yang akan datang. Selain itu, pembelajaran di sekolah tentunya memperhatikan setiap individu dan perlu adanya manajemen kelas untuk mencapai pembelajaran yang berkeadilan dan efektif sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 yang berbunyi:

“Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat guna mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”

SIMPULAN DAN SARAN

Artikel “Meningkatkan pendidikan inklusif dan berkeadilan: jejak kerja sama Indonesia dan UNESCO” membahas tentang upaya Indonesia dalam meningkatkan pendidikan inklusif dan berkeadilan melalui kerja sama dengan UNESCO. Tujuan pendidikan inklusif adalah untuk memastikan bahwa setiap orang, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Sebaliknya, pendidikan berkeadilan menekankan perlunya kesetaraan dalam pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan asal usul, gender, atau kondisi sosial ekonomi.



Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan pendidikan inklusif dan berkeadilan telah menjadi fokus utama pemerintah. Kolaborasi dengan UNESCO telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan aksesibilitas bagi semua. Salah satu langkah penting yang telah diambil adalah mengembangkan kurikulum inklusif yang mempertimbangkan kebutuhan siswa yang beragam. Tujuan kurikulum inklusif adalah agar setiap orang, termasuk masyarakat berkebutuhan khusus, dapat belajar secara efektif sesuai potensi dan kemampuannya.

Selain itu, pelatihan guru dan tenaga kependidikan menjadi fokus upaya peningkatan pendidikan inklusif. Dengan meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka tentang pendidikan inklusif, para guru akan mampu mendorong pembelajaran yang lebih efektif dan menanggapi kebutuhan siswa yang beragam. Secara keseluruhan, kerja sama Indonesia dan UNESCO dalam meningkatkan pendidikan inklusif dan berkeadilan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang masih dihadapi, seperti memenuhi kebutuhan pendidikan inklusif untuk semua, menjamin pemerataan kualitas pendidikan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan inklusif dan berkeadilan. Diharapkan melalui kerja sama lebih lanjut dan langkah-langkah strategis, Indonesia dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan di masa depan.

PUSTAKA ACUAN

- World History Association . (2017).
(2019).<https://Kwriu.Kemdikbud.Go.Id/Reka-M-Jejak/Khusus/Bidang-Pendidikan/>. Kantor Delegasi Tetap Republik Indonesia Untuk Unesco.
The United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization (Unesco). (2022, Desember 09).
Abd. Qadir Muslim, I. Gede Suci Sedana, M. Rizki Pratama. (2021, Oktober).

Analisis Kebijakan Pendidikan Di Jepang, Finlandia, China Dan Indonesia Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Darma Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar*, 6, 170- 186.

- Bell, L., & Stevenson, H. (2006). *Education policy: Process, themes and impact*. Routledge.
Valderrama, F. (1995). (T. O. Penyunting, Ed.) 33.
Frederico Mayor (1995: Vii). (N.D.).
Herawati, N. I. (2016). Pendidikan Inklusif :Telaah Kritis Tentang Pendidikan Yang Berkeadilan. In P.O. Education, & F. A. Yunus Abidin (Ed.), *Primary Foundation In Strengthening Pedagogy Development In Indonesia Future Generation* (Pp. 221-224). Bandung, Bandung, Jl. Raya Cibiru: Upi Kampus Cibiru.
Kartika Puspadari, Y. S. (2023, Januari-Juni). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Inklusif Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH REPUBLIKA*, 11, 305-315.
Mantra, Bagoes. Ida. (2008). *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Mazrieva, E. (2023, Juli 05). Tiga Arsip Bersejarah Indonesia Jadi “Memory of the World” UNESCO .
O’Neil, M.J. (2006). *The Merck Index an Encyclopedia of Chemical Drugs and Biologicals*. New Jersey: Merck and Co. Inc.
Pratiwi, F. S. (2023, Agustus 03). Data 9 Situs Warisan Dunia UNESCO di Indonesia. (D. Bayu, Ed.)
Stainback. (1980). *Educating Children with Severe Maladaptive Behaviors*. New York: Stratton.
Simangunsong, F. (n.d.). *PENCAPAIAN PERKEMBANGAN MILENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) DI KABUPATEN ASMAT*. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 196- 289.
Valderrama, F. (1995). (T. o. penyunting, Ed.) 25.